BAB II

GAMBARAN UMUM PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah singkat pendirian PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Masa Penjajahan Belanda

Sejak masa penjajahan Belanda sampai permulaan tahun 1942 di Indonesia telah di kenal suatu badan yang menyediakan tenaga listrik, baik milik pemerintah, daerah otonom (Gemente) maupun swasta milik BUMN.

Di Jawa Barat (khususnya kota Bandung) perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik untik kepentingan umum, yaitu Bandoengsche Electriciteit Maattschappij (BEM), yang berdiri pada tahun 1905. Pada tanggal 1 Januari 1920 berdirilah perusahaan perseroan Gemeenchappelijk Electrisiteit Bedrijk Voor Bandoeng (GEBEO) yang menggantikan BEM dengan pendirian akta notaris Mr. Adrian Hendrik Van Ophuisen No.213 tanggal 31 Desember 1919.

2. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sa dengan wilayah kerja di seluruh pulau Jawa.

3. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Sampai Sekarang

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, di Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tibanya saat penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1957 merupakan titik tolak dan awal dari pengelolaan dan penguasaan pelistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, karena pada tahun tersebut dimulai dengan adanya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.67 tahun 1961 di bentuk Badan Pimpinan Umum Listrik Negara (BPU-PLN), sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN. Kemudian istilah PLN Bandung diganti dengan nama PLN Eksploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat dengan wilayah kerja ke seluruh Jawa Barat kecuali DKI Jakarta dan Tangerang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara berdasarkan Peraturan Menteri PULT No.013/PRT/1975 tanggal 8 September 1975 tentang organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman PLN Eksploitasi XI No.05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, PLN Eksploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat. Dengan adanya Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Negara menjadi Perusahaan (Persero), maka di bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan dengan sebutan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai akte pendirian.

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Kedudukan Perusahaan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1972 PT. PLN Distribusi Jawa Barat dipimpin oleh Pimpinan Distribusi dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur, dan lima orang Deputy yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Distribusi. Lima orang unsur pembantu pimpinan itu adalah:

1. Bidang Perencanaan
2. Bidang Konstruksi
3. Bidang Pengusahaan
4. Bidang Keuangan
5. Bidang Kepegawaian dan Administasi

Struktur organisasi pada bagian Akuntansi terdiri dari:

1. Kepala Bagian Akuntansi
2. Kepala Seksi
3. Ahli Muda
4. Juru Utama
5. Juru Administrasi

2.3. Deskripsi Jabatan

Tugas pokok PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat adalah melaksanakan pendistribusian dan penjualan tenaga listrik serta pelayanan kepada pelanggan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik.
b) Pengoperasian dan pemeliharaan sistem pendistribusian tenaga listrik.
c) Pegelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
d) Pengawasan pelaksanaan pendistribusian.

Mengingat struktur organisasi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sangat luas, maka penulis hanya akan membahas tugas pokok dan tanggung jawab di bagian akuntansi.

Tugas pokok bagian akuntansi adalah menangani, mengawasi, memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan akuntansi pada umumya yang meliputi: mencatat, mengikhtisarkan dan menyusun laporan keuangan berkala atas data dan dokumen keuangan akuntansi serta melaksanakan analisis dan evaluasi keuangan yang diperlukan.

Bagian akuntansi ini di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti: mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, memberi petunjuk dan menangani pelaksanaan kegiatan akuntansi pada umumnya yang meliputi antara lain mencatat, mengikhtisarkan dan menyusun laporan keuangan berkala atas data dan

dokumen keuangan atau akuntansi serta melaksanakan analisis dan evaluasi keuangan yang diperlukan dan membawahi beberapa Seksi-seksi:

1. Seksi Akuntansi Pengusahan

   Melaksanakan, menyusun laporan keuangan akuntansi untuk unit administrasi yang bersangkutan, antara lain:

   a. Menghimpun surat-surat keputusan, surat edaran pengumuman, petunjuk pelaksanaan baik yang dikeluarkan oleh PT. PLN Pusat, PLN Distribusi Jawa Barat maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
   b. Membuat data, menerima buku-buku harian (memorial) dari seksi atau bagian lain serta membukukannya ke dalam buku besar.
   c. Membuat, menerima nota-nota pembukuan untuk atau dari unit-unit dan satuan administrasi lain.
   d. Membuat daftar pengujian buku-buku harian.
   e. Membuat daftar pembagian biaya operasi dan clearing.
   f. Membina unit-unit mengenai pelaksanaan kegiatan akuntansi pada umumnya.
   g. Menerima, memeriksa dan memantau serta menganalisa Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Perhitungan Tahunan (LPT) dari unit sebagai bahan penyusunan laporan PLN Distribusi Jawa Barat.
   h. Memantau dan mengawasi saldo-saldo perkiraan aktiva dan passiva lancar, perkiraan penutup atau rekening koran, perkiraan netral dari unit-unit dan satuan administrasi lainnya.

i. Menerima laporan dari unit-unit mengenai penerimaan BBM yang dibayar secara menindaklanjuti.

j. Mencatat, mengawasi dan mengikuti perubahan seluruh inventaris.

k. Menyiapkan data yang diperlukan bahan laporan mengenai bidang tugasnya.

l. Melaksanakan tata usaha keuangan gudang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

m. Membuat laporan bulanan persediaan.

2. Seksi Akuntansi Konstruksi

Melaksanakan, menyusun laporan aktiva tetap dan Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP). Laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian laporan keuangan akuntansi, antara lain:

a. Membuat perincian mutasi aktiva tetap bulanan berdasarkan mutasi-mutasi buku besar.

b. Membuat buku harian (memorial) mengenai aktiva tetap untuk diteruskan ke seksi akuntansi pengusahaan.

c. Menyiapkan data aktiva tetap tidak beroperasi untuk di usulkan penghapusannya.

d. Melaksanakan administrasi PDP Konstruksi baik yang dilaksanakan oleh kantor Distribusi maupun oleh unit-unit lain.

e. Mencatat realisasi biaya PDP Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku termasuk perincian sumber dananya.

f. Memantau pelaksanaan PDP Konstruksi dan memproses lebih lanjut PDP-PDP yang telah selesai serta meneruskan ke urusan pengelolaan akuntansi.

g. Menerima, memeriksa dan menganalisis laporan dari unit mengenai realisasi dari PDP-PDP tersebut untuk ditindaklanjuti.

h. Dalam tugasnya bekerjasama dengan unit lain.

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1994 mengenai perubahan status PLN dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) maka maksud dan tujuan PLN adalah:

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dan berdasarkan kaidah bisnis yang sehat guna menjamin keberadaan dan pengembangannya dalam jangka panjang dengan tujuan untuk:
   a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
   b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan listrik.

4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang diperlukan sesuai lapangan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perseroan dapat pula mendirikan Anak Perusahaan dan atau melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha lainnya.

Misi PLN mencakup dua peran adalah sebagai berikut:

a) Sebagai suatu badan usaha, melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan ekonomi.
b) Melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan, penyaluran dan distribusinya di seluruh indonesia dalam jumlah dan mutu yang memadai, berdasarkan kaidah bisnis yang sehat guna menjamin keberadaan dan pengembangannya dalam jangka panjang.

Arah pengembangan perusahaan selama tahun 1995-1999 dalam menghadapi kedua misi tersebut maupun masalah yang dihadapi dalam PJP II dan Repelita VI, adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Keuntungan Yang Wajar

   Tingkat yang menunjukkan perusahaan mampu menyisihkan sebagian dana untuk mengganti aktiva tetap yang dipergunakan serta mendanai sebagian rencana investasinya, kondisi tersebut juga mencerminkan keadaan finansial yang sehat. Kondisi ini diharapkan juga akan menarik para pemberi pinjaman/penanam modal untuk turut serta membiayai sebagian investasi, sebagai pengganti menurunnya Penyertaan Modal Pemerintah.

2. Rasio Elektrifikasi yang saat ini masih rendah perlu ditingkatkan dengan penyediaan tenaga listrik yang cukup dan merata dengan mutu dan keandalan yang baik serta harga yang wajar. Usaha ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
3. Merintis Penyediaan Tenaga Listrik

   Memenuhi penugasan pemerintah yang tidak dilayani koperasi dan sektor swasta seperti penyediaan tenaga listrik bagi para pelanggan di daerah pedesaan dan daerah terpencil.
4. Efektifitas Pembinaan Terhadap Industri Tenaga Listrik

   Pembinaan terhadap industri tenaga listrik perlu ditingkatkan efektifitasnya, seperti usaha bersama dengan pemodal swasta dalam penyediaan tenaga listrik dan penggunaan kandungan lokal.

   Disamping itu juga melaksanakan konversi energi, diversifikasi energi primer non BBM dan kepedulian terhadap lingkungan hidup serta mengupayakan pengendalian sisi kebutuhan untuk mengurangi perlunya tambahan kapasitas penyediaan tenaga listrik.

COMPUTER FOR OWNERS
SWIKON